

# AKAR MASALAH PENYEBAB KONFLIK ETNIS DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA

(Studi Kasus Konflik Etnis di Kalbar dan Kalteng)

Prayudi<sup>1)</sup>

*Beberapa kasus konflik etnik yang terjadi di beberapa tempat di tanah air, telah menyadarkan kita tentang pentingnya upaya memperkuat wawasan kebangsaan guna mencegah terjadinya proses disintegrasi. Kasus konflik etnis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, hanya menjadi dua contoh dari banyak kejadian hampir serupa yang melanda Indonesia. Arus pengungsian massal etnis Madura yang diusir dari Kalteng telah membentuk sebuah gejala tertentu dari kegagalan bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan konteks wilayah tanah air yang terbuka luas untuk dihuni dan dikembangkan oleh setiap warganya. Konflik etnis ternyata telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan cenderung berlarut-larut di tengah segala keterbatasan pemerintah untuk menanganinya secara tuntas. Kalaupun terjadi proses colling down dan muncul himbauan-himbauan ke arah perdamaian, maka hasil yang diperoleh biasanya hanya sementara. Setiap saat atau bahkan tidak terlampau lama sesudah peredaan ketegangan akibat konflik diciptakan maka pada tempo yang tidak terlalu lama, kerusuhan bernuansa etnis dapat terjadi dan berkembang meluas wilayah pertikaiannya.*

Kasus pengusiran etnis Madura dari Kalteng dan beberapa wilayah di Kalbar sangat mengundang keprihatinan di tengah upaya pembentukan rasa nasionalisme bangsa Indonesia

yang saat ini sedang ditimpa krisis di berbagai bidang kehidupan secara berkepanjangan. Bukan nasionalisme bangsa yang ditampilkan, tetapi justru mekuatnya sentimen etnis yang

---

<sup>1)</sup> Prayudi adalah Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) DPR-RI

berkembang di luar batas kewajaran, sehingga membuat bersifat antagonis terhadap sentimen etnis lainnya yang dianggap sebelumnya telah menyebabkan rasa kecemburuan atau bahkan ketidaksukaan. Walaupun sebenarnya, perkembangan sentimen berlandaskan etnik merupakan hal wajar, selama tetap tumbuh di tengah penghargaan terhadap iklim keanekaragaman (pluralitas) kebangsaan.

Keragaman nilai-nilai sosial budaya, termasuk adat kebiasaan suatu suku, merupakan asset sangat penting untuk perluasan potensi bangsa ke arah kemajuan dengan berlandaskan prinsip solidaritas dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan. Mengingat nilai-nilai sosial budaya dalam perspektif etnis menjadi sesuatu yang tergolong harus dihormati dan bahkan bersifat sakral, maka adanya peristiwa yang dianggap kurang menghargai atau melanggar nilai-nilai tersebut jelas mudah mengundang reaksi balik yang mengarah pada suatu permusuhan. Pelanggaran kemanusiaan, berupa penghancuran terhadap hak untuk hidup atau bermukim, kebebasan berusaha, dan bebas dari rasa ketakutan, merupakan beberapa hal yang menjadi dampak dari terjadinya konflik etnis tersebut.

Sebagai akibat tidak tersele-

saikannya secara tuntas dan kurang diperhatikannya akar persoalan yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antaretnis, maka kejadian kerusuhan selalu berulang dan menimbulkan trauma psikologis, kerugian korban jiwa dan harta benda yang sangat parah. Dendam untuk saling membalas kekejaman yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, demikian pula sebaliknya, memperoleh peluang untuk terjadi pada setiap kurun waktu dan sukar dicegah. Ironisnya, faktor pemicu awal terjadinya luapan rasa dendam tersebut justru seringkali merupakan hal yang sederhana dan bersifat pribadi tetapi kebetulan melibatkan dua orang atau lebih yang merupakan kalangan etnis yang sedang memendam rasa tidak suka, merasa tersaingi, dirugikan dan sejenisnya.

Mengingat pentingnya masalah dinamika etnisitas dalam kehidupan kebangsaan, maka tulisan ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik etnis selama ini, terutama dengan mengambil contoh kasus pada peristiwa kerusuhan di Kalbar dan di Kalteng. Mengapa konflik etnis sampai terjadi? Selanjutnya, bagaimana mengatasi konflik etnis dalam konteks upaya memperkuat integrasi kebangsaan di-

pandang dari sudut nasionalisme?

Pembahasan mengenai masalah konflik etnis dalam perpektif memulihkan integrasi kebangsaan, setidaknya mempunyai tujuan pada dua hal: *pertama*, mencari akar masalah sebagai faktor-faktor yang dipandang mendorong terjadinya konflik etnis di tanah air, terutama di Kalbar dan Kalteng pada khususnya. *Kedua*, mengajukan alternatif berupa tindakan kongkrit sebagai unsur-unsur yang memperkuat nasionalisme kebangsaan dalam perpektif keutuhan integrasi bangsa guna mengatasi potensi konflik etnik yang berkembang di tanah air.

## Pembahasan

### 1. Kerangka Teori

Konflik biasanya didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berbentuk nonfisik, dapat pula berkembang menjadi benturan fisik, dapat berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*), dapat pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non violent*). Lebih lanjut, didefinisikan pula pertentangan sebagai kon-

flik manakala pertentangan itu bersifat langsung, yaitu ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Selain itu, pertentangan juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan.<sup>1</sup>

RW. Mack, RC Synder dan Ted Robert Gurr membuat beberapa kriteria untuk menandai bahwa suatu pertentangan dapat disebut sebagai konflik. Pertama, sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya. Kedua, pihak-pihak tersebut saling tarik menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi (*mutually opposing actions*). Ketiga, mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan "sang musuh". Keempat, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa itu dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.<sup>2</sup>

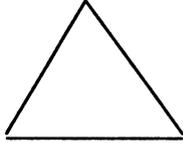
Terdapat sebuah model konflik yang berpengaruh, meliputi konflik simetris dan konflik tidak simetris. Konflik dapat dilihat sebagai sebuah segi tiga, dengan

<sup>1</sup> Eep Saefullah Fattah, "Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi: Sebuah Penjajagan Teoritis", *Prisma*, 8 Agustus 1994.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kontradiksi ©, sikap (A), dan perilaku (B) pada puncak-puncaknya.

### Kontradiksi ©



Sikap (B)

Perilaku (A)

Sumber: Galtung (1996), dalam Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, *Ibid.* h. 22.

Kontradiksi mengacu pada dasar situasi konflik yang termasuk "ketidakcocokan tujuan" yang ada atau yang dirasakan oleh berbagai pihak terlibat. Dalam konflik tidak simetris, kontradiksi ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka dan benturan-benturan kepentingan *inheren* yang ada di dalamnya. Sikap dimaksud termasuk persepsi pihak-pihak yang bertikai dan kesalahan persepsi. Sikap dapat positif atau negatif tetapi dalam konflik dengan kekerasan, pihak-pihak yang bertikai cenderung mengembangkan stereotip yang merendahkan masing-masing, dan sikap ini sering dipengaruhi emosi, seperti halnya ketakutan, ke-

marahan, kepahitan, atau kebencian. Sikap ini termasuk elemen emosi (perasaan), kognitif (keyakinan), dan konatif (kehendak).

Perilaku adalah komponen ketiga, hal ini termasuk kerjasama atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh, menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan melalui ancaman, pemaksaan, dan serangan merusak. Aspek obyektif seperti hubungan struktural, kepentingan material atau perilaku yang bertentangan merupakan sumber-sumber konflik.<sup>3</sup> Hal penting dari perspektif teoritis semacam ini adalah perbedaan antara kekerasan langsung (anak-anak dibunuh), kekerasan struktural (anak-anak mati dalam kemiskinan), dan kekerasan budaya (apa pun yang membutuhkan kita atau membenarkan bentuk kekerasan). Untuk dapat mengakhiri kekerasan langsung yaitu dengan mengatasi konflik budaya, kekerasan struktural, dengan memindahkan kontradiksi struktural dan ketidakadilan, serta meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai penyimpangan.<sup>4</sup> Ketiga faktor mengatasi penyebab konflik tersebut yang saling terkait

<sup>3</sup> Galtung (1969, 1996, 72), dalam Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, h. 20-22.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 22.

erat satu sama lain keberadaannya menjadi kerangka acuan dalam pembahasan tulisan ini.

Sementara itu, konteks terjadinya konflik etnik pada suatu negara, terutama bagi negara yang mempunyai lapisan kebangsaan yang sangat beragam, sering diidentikkan dengan acuan ketidakmampuan negara dalam mengelola ikatan primordial. Titik pusat keguncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa sebab yang seringkali timbul bersama dan berlawanan tujuan. Secara deskriptif, masalah-masalah yang timbul antara lain yaitu mengenai Hubungan Darah (Kesukuan) Pembatasan yang penting di sini ialah yang bersifat kwasi-kewarganegaraan, karena hubungan yang terwujud, akibat ikatan biologis (keluarga besar, garis keturunan, dan sebagainya) terlalu terbatas untuk dianggap cukup berarti. Oleh karena itu, pengenalan lebih berada pada hubungan keluarga yang bersifat sosiologis, seperti halnya kesukuan. Pada konteks pertikaian sosial di Kalbar dan Kalteng, tampaknya

juga berkaitan dengan masalah kebiasaan. Perbedaan-perbedaan dalam bentuk kebiasaan yang mengiringi disharmoni hubungan antarsuku sering merupakan dasar dari salah satu segi perpecahan nasional. Gejala ini terutama berperan penting dalam keadaan adanya suatu kelompok yang secara intelektual dan kesenian merasa dirinya pembawa "peradaban" di tengah penduduk lain yang dianggapnya kasar dan yang harus berpedoman pada golongan yang "unggul".<sup>5</sup>

Kuatnya loyalitas primordial justru telah menjadi gejala umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang setelah memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial.<sup>6</sup> Konflik antaretnis sangat mudah terjadi di tengah kondisi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan pasca kolonial yang masih rawan terhadap pemenuhan unsur keadilan di bidang politik, sosial, dan hukum di satu sisi dan kesejahteraan ekonomi di sisi lain. Sebagai akibatnya, nasionalisme yang menjadi landasan

---

<sup>5</sup> Clifford Geertz, "Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-Negara Baru", dalam Juwono Sudarsono (ed.), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1982, h. 5-7.

<sup>6</sup> Mengenai perspektif sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia dalam kaitan antara lain dengan pihak kolonial, lihat Robert Crib, "Bangsa: Menciptakan Indonesia", dalam Donald K. Emerson (Ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama kerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia, Jakarta, 2001, h. 3-65.

awal pembentukan integrasi bangsa menjadi masalah untuk mentransformasikan menjadi loyalitas aspirasi kebangsaan. Nasionalisme itu sendiri merupakan paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam mengenai suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, terhadap tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada sepanjang sejarah yang memiliki kekuatan berbeda-beda.<sup>7</sup> Nasionalisme menunjuk pada kesetiaan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang berwujud pada kendali terhadap sumber-sumber potensial bagi terjadinya konflik antarberbagai lapisan masyarakat di satu sisi dan di tingkat elit di sisi lain.

Persoalannya adalah bagaimana kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dapat mewadahi berbagai aspek keanekaragaman yang berkembang di tingkat masyarakat agar bermakna positif bagi penguatan integrasi nasional, yaitu melalui perubahan perilaku konflik, penyebab kekerasan struktural, dan mengubah sikap kekerasan ke arah kerjasama secara konstruktif. Artinya, melalui wadah terse-

but dapat ditumbuhkan dan sekaligus diperkuat nasionalisme yang mengatasi paham sempit kelompok dan aspirasi primordial yang tetap berada pada kerangka penghargaan terhadap aneka perbedaan yang bersatu dalam wadah persatuan dan kesatuan.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis

Kelompok sosial disebut sebagai etnis, karena mereka mempunyai satu atau lebih simbol-simbol kebudayaan, seperti halnya sebagai akibat dari agama atau kepercayaan, keturunan, bahasa, kesamaan asal usul (negeri), gaya hidup, dan adat istiadat. Pengertian suku menggambarkan adanya sejumlah manusia yang menyandang kebudayaan tunggal dengan unsur-unsur sama, bahasa, tata hidup dalam keluarga, adat istiadat, tata hubungan antara manusia beserta alam sekitarnya, dan sebagainya. Suku berbeda dari ras yang lebih banyak menunjukkan perbedaan ciri-ciri tubuh antara dua atau lebih kelompok, ras kulit hitam, ras kulit sawo matang, ras kulit kuning, dan ras kulit putih. Konflik antarsuku yang sering disebut sebagai konflik etnis (*ethnic conflict*) dapat terjadi kalau: (a) ada dua suku hidup berdama-

<sup>7</sup> Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, Pustaka Sardjana PT Pembangunan, Jakarta, 1958 h. 1.

pingan; (b) dalam hubungan sosialnya terjadi interaksi; dan © dalam interaksi itu dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak bahwa ada unsur-unsur budaya yang bertentangan, ada ketimpangan sosial (satu pihak dominan terhadap pihak lainnya), atau terdapat sumber kehidupan yang menjadi bahan perebutan.<sup>8</sup>

Fase terjadinya konflik pada dasarnya dapat dikenali, hanya tata urutannya tidak berjalan menurut aturan tertentu, dan oleh karenanya sulit ditebak. Hal ini sesuai dengan karakter konflik kekerasan yang sangat dinamis, bahkan *volatile* (bergerak tak beraturan). Yang menentukan conjungtur konflik kekerasan adalah eskalasinya, meluas atau tidak.<sup>9</sup> Pergeseran dari satu fase ke fase lainnya tidak selalu menimbulkan akibat yang sama, bahkan sering tidak terduga, misalnya banyak konflik etnis yang berhenti dengan sendirinya, tan-

pa campur tangan pihak lain sebagai penengah. Semua pergeseran fase dan akibat yang ditimbulkannya, merupakan interaksi dari berbagai faktor yang sudah ada sebelumnya.<sup>10</sup> Kompleksitas konflik etnis, khususnya yang terjadi di Kalteng dan Kalbar, setidaknya disebabkan oleh akar permasalahan faktor-faktor berikut ini:

### Faktor Kontradiksi Budaya

Terdapat banyak stereotipe sosiologis yang melekat pada etnis dan wilayah budaya tertentu yang menunjukkan karakteristik kesatuan etnis dan budaya itu dalam interaksi multi-kulturalisme. Sentimen itu dapat bernada kekaguman, memuji, sampai dengan mengejek, dan berkonotasi sinisme. Stereotipe ini sangat multidimensional, negatif maupun positif, ironis atau bahkan tragis, lugu mau-

<sup>8</sup> Selo Sumardjan, "Konflik Antarsuku di Indonesia", *Kompas*, 22-3-2001.

<sup>9</sup> Fase-fase konflik kekerasan antar etnis setidaknya ada empat. *Pertama*, tahap pendahuluan, pada fase ini faktor struktural telah menjadi lahan subur yang kondusif untuk meledaknya konflik kekerasan antar etnis. Jika fase pertama gagal ditanggulangi, realitas sosial segera memasuki tahap *kedua*, yaitu tahap titik didih. Pada tahap ini, faktor struktural penyebab konflik telah benar-benar kondusif bagi meledaknya konfrontasi terbuka antar-etnis yang saling memendam rasa permusuhan. Jika tahap ini gagal diatasi, maka akan memasuki tahap berikutnya, yaitu *ketiga*, konflik kekerasan secara terbuka. Untuk mengendalikan eskalasi konflik dilakukan tindakan darurat dan militer dapat diikutsertakan untuk mencegah eskalasi konflik ke daerah lain yang berdekatan dan mempunyai komposisi etnis serupa. Fase berikutnya, *keempat* yaitu tahap peredaan konflik dengan dilakukan pencegahan berbagai hal yang menjadi sumber awal terjadinya konflik. Lihat Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, "Mencegah Konflik Kekerasan Antar Etnis", *Kompas*, 3-4-2001.

<sup>10</sup> *Ibid.*

pun licik.<sup>11</sup> Suku Dayak berkebudayaan primordial, dalam tata hidupnya suku itu berorientasi pada dirinya sendiri (*inward looking*). Mereka percaya bahwa di dalam lingkungannya yang banyak hutan dan rawa telah menyulitkan hubungan dengan dunia luar. Mengenai lingkungan itu sendiri dianggap ada dua macam, yaitu masyarakat manusia hidup dan masyarakat roh-roh manusia yang sudah meninggal. Kedua masyarakat itu saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan itu dilakukan menurut adat yang kuat dan hidup, lagi pula menggalang kesetiaan pada masyarakat hidup dan masyarakat roh yang tidak boleh diganggu. Dalam rangka kebudayaan, kepercayaan dan adat itu, suku Dayak mempunyai sikap ramah tamah, penuh toleransi, dan tenggang rasa ketika berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi kalau terdapat pihak lain yang melanggar adat, dan dengan sendirinya merusak hubungan dengan masyarakat roh-roh leluhur mereka, maka mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan senjata tradisionalnya, disebut mandau, dan memotong kepala lawannya se-

bagai bukti kepada roh-roh leluhur bahwa mereka membela kehormatan roh-roh itu.<sup>12</sup>

Sebaliknya ciri-ciri suku Madura dapat digambarkan sebagai berikut. Orientasi kebudayaannya adalah keluar (*outward looking*). Mengingat daerah asalnya, pulau Madura, adalah kering dan gersang, maka kebudayaannya mengajarkan kerukunan dan keberanian untuk bertahan hidup. Masyarakat Madura menganggap, bahwa lahan hidup mereka itu tidak terbatas pada pulau Madura saja, tetapi di daerah-daerah seberang lautan pun dianggap mereka anggap pantas dijadikan sumber penghidupan. Mereka yang merantau adalah sebagian karena terpaksa sebab sumber penghidupannya yang benar-benar sempit, sedangkan sebagian lainnya adalah berwatak dinamis, mandiri, serta berupaya memperluas lingkungan hidupnya sampai di seberang lautan. Orang-orang Madura yang berwatak demikian itulah yang berlayar sampai Kalbar dan Kalteng, lalu mereka membentuk komunitas pendatang.<sup>13</sup> Perbedaan landasan nilai-nilai budaya ini, merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya ju-

---

<sup>11</sup> Ahmad Fathoni Rodli, "Menelusuri Resolusi Konflik Enis di Kalimantan", *Suara Pembaruan*, 3-3-2001.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

rang komunikasi antara suku Madura dan suku Dayak yang sangat potensial bagi terjadi iklim kecemburuan, salah pengertian, dan rasa persaingan.

Jika diperhatikan seksama, baik di Kalbar maupun Kalteng, maka wilayah konflik antaretnis Dayak atau Melayu dengan Madura umumnya merupakan sentra arus urbanisasi. Wilayah-wilayah tersebut mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi, namun belum tentu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal oleh penduduk lokal. Semarak arus urbanisasi menjadikan daerah tersebut semakin diwarnai oleh aneka macam suku dengan budaya, perilaku serta cara hidup yang berbeda-beda. Prinsip hidup "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung" kadangkala mengalami proses terabaikan. Meskipun demikian, arus urbanisasi tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Hal ini mengingatkan adanya langkah tersebut merupakan hak setiap orang untuk memperbaiki taraf hidup. Hanya saja, yang selalu menimbulkan malapetaka adalah langkah itu dilakukan secara berkelompok dalam satu etnis, lalu begitu tiba di wilayah yang baru berusaha menguasai pengelolaan sumber daya alam yang ada atau pertumbuhan sentra-sentra bisnis setempat.

Kota Sampit misalnya, sebenarnya sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan Kalimantan Tengah. Wilayahnya di pinggir laut, dan merupakan tempat persinggahan kapal-kapal dagang, sehingga proses perekonomian Kalteng terpusat di sini. Faktor inilah yang menjadikan Sampit lebih maju dibanding kota lainnya di Kalteng. Luas kota ini mencapai 2.420 hektar, dihuni 652.294 jiwa (sensus penduduk 2000) dan hampir 70% penduduknya adalah pendatang. Dari sekian banyak pendatang yang ada di kota ini, 50% di antaranya adalah warga etnis Madura. Sisanya, etnis Banjar, Tionghoa, Batak, dan lainnya. Jumlah warga etnis Madura di kota Sampit diperkirakan mencapai 100.000 jiwa. Dari sekian banyak penduduk asli, hanya sebagian kecil tinggal di pusat kota, yaitu sekitar 30-40 ribu jiwa. Sisanya, lebih memilih tinggal di pinggiran kota atau pedagang. Alasannya sederhana, selain sudah merupakan kebiasaan hidup, juga karena sikap menyalah kepada pendatang. Sehingga, terkesan kota Sampit dikuasai pendatang di semua lini kehidupan, termasuk perekonomian. Akibatnya, terjadi perbedaan strata kehidupan yang jauh antara penduduk asli dan pendatang. Warga Madura dan

Tionghoa adalah dua etnis yang menguasai perekonomian.<sup>14</sup>

Ekses dari perilaku agresif semacam itu menimbulkan pertikaian atau bahkan peperangan antaretnis. Dalam perspektif sosiologis, stereotipe selalu melekat dalam karakteristik ras, etnis, suku, bahkan kelas, dan golongan. Stereotipe itu dapat pula saling berhimpitan (*coincided*) antara berbagai dimensi atau parameter yang secara multikulturalisme bukan mustahil akan menjadi stigma. Madura sebagai kesatuan etnis dan wilayah budaya tidak terlepas dari stereotipe semacam itu yang termanifestasikan dalam perilaku orang Madura di mana saja, apakah kampung halaman atau di wilayah perantauan. Stereotipe yang menunjukkan betapa gigih orang Madura dalam mempertahankan hidupnya dengan etos kerja yang luar biasa. Kemampuan orang Madura dalam memanfaatkan ruang sekecil apa pun, terutama bersedia dengan bekerja apa saja (asal halal) dan bahkan kalau perlu menjadi tenaga kuli, menjelma menjadi stereotipe yang bernada kekaguman

maupun sinisme, serius, maupun guyonan.<sup>15</sup>

Etos kerja keras dan ikatan komunalisme warga Madura yang sangat kuat di tengah pertumbuhan sentra-sentra bisnis ekonomi dan jabatan pemerintahan sebagai akibat bergulirnya proses pembangunan justru mengalami kesenjangan sosial budaya dengan sikap atau perilaku masyarakat Dayak. Kesenjangan sosial budaya telah begitu mengental sehingga pada gilirannya yang berkembang bukannya persepsi nasionalisme kepada bangsa dan negara tetapi loyalitas sempit kepada kepentingan etnik yang kurang menghargai keanekaragaman. Kesenjangan dimaksud telah memperkuat kemungkinan terjadinya salah pengertian dalam perspektif kontradiksi interaksi antara kedua etnik yang pada gilirannya mempermudah terjadinya konflik. Faktor kesenjangan nasionalisme antara etnik Madura dan Dayak juga membuat kompleksnya upaya menangani potensi kerusuhan secara tuntas. Akibatnya, ingatan kolektif massa antarkedua etnik

<sup>14</sup> Permasalahanpun selalu timbul antara penduduk asli dan pendatang. Bagi kebanyakan warga Dayak, mereka merasa selalu dirugikan jika bermasalah dengan warga Madura. Sedangkan jika bermasalah dengan warga pendatang lainnya, masih dapat diselesaikan melalui diplomasi. Umumnya penduduk asli selalu menang, dan kemudian lebih memilih hidup di pedalaman. Untuk masalah ini diulas dalam "Menguak Konflik Antaretnis di Tanah Dayak: Adakah Pertikaian itu karena masalah Martabat?" (Bagian II), *Media Indonesia*, 8-3-2001.

<sup>15</sup> *Ibid.*

terhadap berbagai benturan yang terjadi sukar dihilangkan begitu saja, meskipun tindakan perdamaian dicoba dilakukan pada tataran negara dengan melibatkan para kalangan yang dianggap menjadi wakil atau tokoh masyarakat. Dari suatu insiden lalu lintas yang sepele dan tidak menimbulkan kecelakaan, ternyata hal itu sudah cukup untuk menyulut kerusuhan sosial. Sebelumnya pasti telah terendap ingatan kolektif yang mengandung benih-benih kecurigaan dan dendam antarkelompok, sehingga begitu ada pencetus betapa pun kecilnya, ditambah provokasi spontan atau terencana disertai ancaman, dengan mudah insiden itu berdampak luas.

Gejala di atas menggambarkan, rekonsiliasi yang diusahakan sejauh ini hanya bersifat temporer, tidak menyentuh akar persoalan.<sup>16</sup> Masalah yang sebenarnya pelik dan sangat serius, dianggap selesai begitu saja mel-

lui terjadinya kesepakatan damai yang diwakili pihak-pihak bertikai dengan disaksikan aparat pemerintah dan keamanan.<sup>17</sup> Kuatnya benturan aspirasi sosial ekonomi dan peradaban antarkedua etnik telah menimbulkan evakuasi warga Madura yang dianggap sebagai pendatang ke tanah asalnya dengan mengatasnamakan slogan penduduk asli. Padahal, proses regenerasi yang telah berjalan selama kurun waktu panjang mampu menempatkan cairnya batas-batas pendatang dan penduduk asli. Sehingga tidak heran, ketika arus pengungsian berkembang luas ternyata diperoleh masalah-masalah pribadi kemanusiaan yang menjadi masalah serius nasionalisme Indonesia di tengah kejadian pengusiran etnik tertentu dari suatu tempat.<sup>18</sup>

Perkawinan dan persoalan pribadi yang berkembang dari interaksi sosial antarkedua suku ternyata tidak menjawab sikap saling curiga, membenci, dan

<sup>16</sup> Yonky Karman, "Kerusuhan di Kalimantan Barat: Potret Rekonsiliasi Setengah Hati", *Kompas*, 20-11-2000.

<sup>17</sup> Pada tahun 1997 didirikan tugu perdamaian di Kalbar, namun sesudah itu masih terjadi dua kali lagi kerusuhan besar termasuk yang terjadi pada tahun 2000. Wakil-wakil kelompok masyarakat mungkin mau saja berdamai, tetapi massa akar rumput dengan ingatan kolektifnya yang buruk, sama sekali belum tersentuh dalam kesepakatan damai yang sudah diambil. Emosi dan impresi negatif mereka tetap hidup dan menjadi benih-benih konflik dimasa mendatang. Permasalahan konflik belum tuntas sampai ke akarnya. Sebuah rekonsiliasi setengah hati, lihat *Ibid*.

<sup>18</sup> Misalnya, lelaki Madura yang terpaksa meninggalkan istrinya yang berasal dari suku Dayak, bersama seorang anaknya. Istrinya yang sedang hamil enam bulan terpaksa ditinggalkan bersama seorang anaknya, lihat Anhar Gonggong, "Ketika Orang-orang Kalah yang Sebangsa itu Saling Benci", *Suara Pembaruan*, 3-3-2001.

kecemburuan antarkedua kelompok massa etnik. Padahal, interaksi sosial yang terus berakumulasi proses perjalanannya justru telah mengaburkan batas antara pihak pendatang dan penduduk asli. Dalam studi-studi integrasi sosial, di samping faktor budaya, terdapat faktor struktural yang harus diperhitungkan secara seimbang, yaitu yang berkaitan dengan kekuasaan terhadap sumber daya politik dan ekonomi masyarakat. Kedua faktor ini memang terpisah satu sama lain, tetapi dapat saling dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### Faktor Kekerasan Struktural:

Berdasarkan faktor struktural, dapat dilihat proses-proses ekonomi dan politik pembangunan yang selama Orde Baru berlangsung di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.<sup>19</sup> Kasus Sampit merupakan salah satu cermin gagalnya pelaksa-

naan kebijakan pembangunan nasional/daerah yang dapat memberikan tingkat kesejahteraan merata bagi seluruh komponen masyarakat setempat. Akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan politik daerah, sangat terbatas. Pengelolaan sumber daya alam di masa Orde Baru dan bahkan terus berkelanjutan di masa reformasi, tidak banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Mereka termarginalisasi, kecuali bagi kaum elit yang berkonspirasi. Setiap suara yang berbeda dengan pandangan pemerintah akan dianggap sebagai sesuatu pembangkangan dan harus disingkirkan. Sehingga tidak heran, paham kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi slogan tanpa makna yang pada kenyataannya justru dominan dengan orientasi politik negara ke arah penyeragaman.<sup>20</sup>

Proses semacam ini ditopang

<sup>19</sup> Kusnaedi, "Negara, Kelompok Etnik, dan Konflik Sosial", *Kompas*, 4-3-2001.

<sup>20</sup> Padahal, realitas menunjukkan bahwa hanya sedikit negara yang terdiri dari satu bangsa. Sebaliknya, suatu negara dengan aneka bangsa lebih banyak ditemukan. Sehingga lebih tepat disebut sebagai "*nations-state*" daripada "*nation-state*". Bangsa (*nation*) adalah suatu "konsepsi kultural" tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu *kinship* (kerabat) yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan *self rule*. Sedangkan negara (*state*) adalah suatu "konsepsi politik" tentang suatu entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewargaan (*citizenship*). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan dengan suatu komunitas politik (negara) di tengah kedudukan yang sederajat di depan hukum. Bangsa beroperasi atas prinsip kekariban, sedangkan negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan. Lihat Yudi Latif, "Dari Wacana Kebangsaan Menuju Wacana Kenegaraan: Menganyam Bangun Retak Kebangsaan Melalui Reformasi Pengelolaan Negara", Pidato Politik dalam rangka Peluncuran CPPS, Paramadina, Jakarta, 14 Maret 2001, h. 15-17.

oleh suatu jaringan kekuatan militer dan aparat birokrasi yang mengelola kehidupan kemasayarakatan dan kenegaraan guna menciptakan stabilitas nasional sebagai landasan berjalannya berbagai program pembangunan, terutama menyangkut pertumbuhan ekonomi. Masalah SARA menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka dan kurang dipahami sebagai sebuah potensi bangsa yang justru harus diupayakan semaksimal mungkin bagi perluasan kemampuan sumber daya nasional. Pembentukan integrasi bangsa yang dihasilkan hanya bersifat semu dan sangat rapuh manakala ikatan kekuatan penopang stabilitas negara itu mengalami krisis sebagai akibat tindakan penyalahgunaan wewenang mulai dari pihak pengambil kebijakan itu sendiri sampai pada tataran para pelaksananya di lapangan. Sehingga terdapat kaitan yang kuat antara pola pengembangan kehidupan berbangsa yang ingin ditegakkan dengan cara pengelolaan negara dalam kerangka sistem politik nasional secara keseluruhan.

Kegagalan dalam melaksanakan agenda modernisasi telah menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang kurang menguntungkan bagi hubungan antara penduduk asli dan pendatang. Kecemburuan dan kegelisahan

sosial yang terjadi telah diperparah dengan adanya faktor perebutan sumber daya politik pemerintahan, terutama menyangkut jabatan yang justru mempermudah masuknya unsur dari luar untuk menggerakkan terjadinya konflik etnik berupa kerusuhan massa. Faktor ini berwujud pada semakin menguatnya kepentingan politik lokal setelah bergulirnya reformasi. Kondisi tersebut mengakibatkan penuntasan konflik antar etnis selalu diambangkan, bahkan sengaja diulur atau cenderung setengah hati ditanggapi atau dicegah oleh oknum pejabat pemerintah daerah dan kaum elit politik lokal. Mereka menginginkan potensi konflik antar etnis di wilayahnya tetap subur berkembang sehingga sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesuksesan perjuangan politik.

Polarisasi, sikap antipati, serta permusuhan antar etnis terus menerus dihembuskan. Benih kecurigaan ditebarkan di mana-mana. Pola pikir dan tindakan masyarakat pun direkayasa agar tidak mampu membedakan kasus dan kepentingan pribadi, serta perorangan. Ambisi perorangan dikemas menjadi kepentingan kelompok. Setelah itu dibakar dan dibangkitkan solidaritas etnis supaya memperjuangkan kepentingan pribadi sejumlah oknum elit politik secara bersa-

ma-sama. Kasus perluasan kerusuhan sampai ke Kuala Kapuas yang mendekati perbatasan Kalteng dan Kalsel, menegangkannya kembali suasana Pangkalan Bun justru setelah kasus Sampit mereda, kiranya mencerminkan ambisi perorangan dan kelompok elit terutama berkaitan dengan perebutan jabatan Gubernur atau kualitas hubungan aparat keamanan terhadap masyarakat sekitar.

Gejala di atas membawa dampak terhadap sukarnya upaya rekonsiliasi terhadap pihak-pihak yang bertikai, apabila hanya sekedar berpegang pada proses perdamaian berdasarkan kesepakatan di antara tokoh-tokoh formal dan orang yang dianggap sebagai "pemuka masyarakat setempat". Modernisasi berbagai sektor kemasyarakatan yang pernah secara giat dilakukan di masa kurun waktu panjang melalui pelaksanaan ideologi pembangunan dimasa rezim Orde Baru, dianggap mempunyai peranan dalam menempatkan kalangan pemuka adat atau tokoh masyarakat di daerah pada posisi pinggiran. Target pertumbuhan ekonomi dengan mekanisme pelaksanaan program-program pembangunan yang digerakkan secara tersentralisir, semakin memperkuat konsekuensi modernisasi kemasyarakatan bagi keperluan penem-

patan posisi elit informal pada posisi pinggiran. Akibatnya, ketika terjadi konflik di masyarakat, terjadi kelangkaan tokoh masyarakat yang dapat mempunyai pengaruh signifikan bagi masyarakat.

### **Faktor Pengelolaan Negara:**

Faktor pemicu konflik etnik ketiga, adalah kemampuan pengelolaan negara terutama berkaitan dengan masih memburuknya kinerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Hukum tidak pernah ditegakkan sebagaimana yang diidamkan masyarakat. Demi pemenuhan kebutuhan ekonominya, aparat keamananpun cenderung menyuburkan premanisme serta tindak kekerasan lainnya. Pelaku kejahatan yang telah ditangkappun dapat dilepaskan dan dibebaskan dari segala tuduhan setelah ia menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan aparat kepolisian. Perilaku buruk semacam itu masih banyak dipraktikkan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan warga mengenai jaminan keamanan dan keharmonisan hidup antaretnis.

Penanganan hukum yang kurang memadai mengakibatkan interaksi antaretnik yang sedang mengalami proses sosial saling bersikap memusuhi dan curiga memperoleh momentum untuk semakin meluas dan sewaktu-

waktu menjadi amunisi bagi alasan terjadinya kerusuhan. Sehingga tidak heran, bagi mereka yang berseteru sukar membedakan antara masalah pribadi dan masalah publik dalam kaitan sikap atau tindakan pelanggaran hukum. Ketidakterseriusan untuk menegakkan hukum, ketidakcermatan strategi pelaksanaan program pembangunan, perebutan jabatan politik pemerintahan. Di dalam ketidakjelasan fungsi kenegaraan dan ketiadaan perlindungan hukum, keadilan dan keamanan bagi individu untuk mengembangkan dirinya, orang lebih nyaman untuk memilih menjadi warga *tribus* (tribalisme, premanisme, dan koncoisme) daripada sebagai seorang warga negara. Persoalan ekonomi-politik dan budaya yang bersumber dari manajemen negara yang korup menyisakan kelangkaan dan ketimpangan alokasi sumber daya di rumah tangga kebangsaan.<sup>21</sup>

Di tengah masa transisi saat ini, kalangan elit di pusat lebih disibukkan dengan upaya mempertahankan kekuasaannya ma-

sing-masing dan persoalan per-seteruan politik antar mereka. Sebagai akibatnya efektivitas negara dalam menjalankan perannya sebagai regulator kehidupan bangsa secara dinamis dan tertib lebih minimal dibandingkan reaksi aspirasi penduduk lokal yang menginginkan untuk mampu ditangani dan diolah secara berkeadilan oleh sistem politik. Di masa sebelumnya, yaitu ketika regim Orde Baru memegang tampuk kekuasaan, ketertiban yang diciptakan hanya bersifat semu karena penggunaan pola kekerasan digunakan untuk membungkam aspirasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan kekuasaan. Dalam hal ini, kita dapat bercermin terhadap pengalaman Yugoslavia, sebuah negara yang pernah dipimpin Joseph Broz Tito telah menghadapi keadaan disintegrasi, dan penyebabnya adalah konflik kekerasan antar etnis.<sup>22</sup> Otoriterisme sistem politik yang dihasilkan oleh negara ternyata hanya menghasilkan semakin kuatnya sentimen etnis dalam interaksi sosial

<sup>21</sup> Yudi Latif, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> Mengapa nasionalisme atau paham kebangsaan yang bangkit di Eropa Timur bersifat anti demokrasi? Alasannya, terutama terletak pada pemahaman tentang "natie" atau bangsa itu sendiri yang merupakan inti gagasan tentang negara bangsa di wilayah ini. Keanggotaan dalam bangsa dibatasi dibatasi dengan garis keturunan (*genealogy*). Artinya, identitas kebangsaan dihubungkan dengan keturunan etnik yang dianggap sama serta kesamaan bahasa, agama, mitos, dan kebudayaan. Lihat VP Gagnon, "Jalan Serbia Menuju Perang", dalam Larry Diamond dan Marc F Plattner (ed.), *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*, Penerbit ITB, Bandung, 1994, bab 8.

kemasyarakatan dan perilaku kenegaraan.

#### Alternatif Pemecahan:

Guna mengembalikan situasi keamanan di daerah yang sedang atau pernah dilanda konflik etnis, sebagaimana di Kalteng dan Kalbar, tidak cukup hanya sekedar mengandalkan pada pendekatan stabilitas semata, tetapi harus merupakan upaya pemecahan secara menyeluruh yang bersifat sistematis. Alternatif pemecahan ini berdasarkan pada kesadaran luasnya ruang lingkup akar masalah yang menyebabkan timbulnya konflik, sebagaimana dideteksi dari faktor kontradiksi budaya, kekerasan struktural, dan kemampuan pengelolaan negara.

Dari faktor kontradiksi budaya sebagai penyebab konflik etnis, tampaknya diperlukan sebuah upaya sosialisasi kebiasaan masing-masing secara komunikatif, terbuka, dan berusaha saling menghormati untuk dapat mencegah sikap salah paham terhadap pemahaman nilai-nilai. Pemahaman secara timbal balik mengenai nilai-nilai kebiasaan ini tentunya terkait dengan adanya anggapan-anggapan subyektif yang mewarnai penggunaan *stereotype* mengenai suku tertentu

terhadap suku lainnya. Unsur-unsur anggapan subyektif dalam penggunaan perspektif semacam ini harus dieliminasi seminimal mungkin, karena hal ini telah memicu terjadi ketidaksukaan, meluasnya kecemburuan, dan sejenisnya antar kalangan etnik.

Salah satu titik pemecahan geografis dari konsep desentralisasi yang dikembangkan dalam pemerintahan daerah, adalah menyangkut regionalisasi atau *gewestvorming*. Berarti, terdapat rasio yang berbasis etnik, seperti halnya Basque di Spanyol, bahasa atau budaya di Belgia dan Swiss, ekonomi dan etnis (Corsica) di Perancis, ekonomi/lingkungan hidup seperti *waterschappen* di Belanda, dan lain-lain. Masyarakat hukumnya adalah masyarakat yang homogen menurut tolok ukur regionalisasi tersebut. Di Indonesia, dikenal tradisional Subak di Bali, *waterschappen* di daerah Yogyakarta dan Surakarta di zaman Hindia Belanda.<sup>23</sup> Sekarang dibentuk kawasan-kawasan daerah aliran sungai, hutan, dan sebagainya dengan pengelolaan secara administratif. Asas demokrasi yang ingin dikembangkan oleh desentralisasi, seharusnya menjadi suatu bentuk daerah otonom atau daerah administratif atau

<sup>23</sup> Ben Mboi, "Otonomi Daerah Terlalu Cepat?", *Kompas*, 4-4-2001.

kombinasi otonom administratif.

Dengan membentuk regionalisasi dari kawasan-kawasan tertentu berdasarkan acuan perspektif otonomi daerah yang dianut, maka sistem kemasyarakatan dapat menampung persoalan interaksi budaya antaretnis. Regionalisasi kawasan terutama berkaitan terhadap proses setelah tibanya para pendatang ke kawasan yang sejauh mungkin dapat diakulturasikan dengan budaya penduduk asli setempat. Sehingga, kesalahpahaman antar mereka sebagai akibat pemahaman nilai-nilai budaya yang berbeda dapat dihindarkan dan justru diupayakan untuk ditransformasikan pada konteks kekayaan tersendiri bagi masyarakat di kawasan tersebut. Artinya, interaksi budaya yang sangat beragam dikembangkan melalui struktur kawasan pengembangan wilayah dalam konteks lokal yang tetap menghargai prinsip persatuan dan kesatuan. Regionalisasi kawasan sekaligus dapat merupakan pengejawantahan dari pembentukan rasa nasionalisme kebangsaan yang dapat mengatasi secara cerdas kemungkinan adanya fanatisme buta terhadap kontradiksi etnis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dari sudut kekerasan struktural, pembangunan kemasya-

rakatan dan kenegaraan harus ditempatkan dalam posisi yang sama sekali tidak melakukan penyeragaman secara paksa. Sebaliknya, potensi masing-masing lapisan kebangsaan digerakkan menuju suatu iklim kemajuan dengan harapan pada terciptanya tatanan struktural yang bersifat kemajemukan atas dasar rasa nasionalisme yang kuat. Mengingat akses sosial ekonomi penduduk asli, seperti halnya suku Dayak yang terkesan tertinggal dari pendatang terutama dibandingkan suku Madura, harus secepatnya dibuka dengan tanpa mengurangi iklim terbukanya peluang kompetisi secara sehat diantara pelaku ekonomi itu sendiri. Sementara itu, terdesaknya suku Madura dan harus dievakuasi untuk mengungsi ke daerah lain atau terutama ke Jawa Timur dan wilayah sekitarnya, harus dipandang merupakan hanya kondisi darurat yang untuk sementara waktu dapat diterima dalam jangka pendek. Untuk itu, pemulihan rasa aman dan kondisi ketertiban di wilayah Kalbar dan Kalteng dengan rehabilitasi psikologis ke arah substansi perdamaian yang disosialisasikan secara gencar ke berbagai tempat jalan berbarengan dengan pemusnahan semaksimal mungkin berbagai hal mengenai potensi kekerasan struktural yang dianggap telah mem-

buat kecemburuan sosial atau kecurigaan.

• Pada pihak lain, dari sudut kemampuan pengelolaan negara, situasi transisi politik yang dihadapi saat ini merupakan problem rawan yang harus dihadapi di tengah ketidakseimbangan kendali kebebasan yang dibuka oleh sistem politik dengan akumulasi aspirasi yang sedang berkembang. Pemulihan ketidakberdayaan negara dalam mengatasi persoalan keamanan bagi warganya, bukan berarti dikembalikannya kepada pola sentralistik dengan warna otoriter berbagai tindakan aparat negara dalam menanggapi tuntutan para warganya sebagaimana pernah dipraktekkan di masa Orde Baru. Tetapi, pemulihan tersebut lebih ditempatkan pada kemampuan mengolah aspirasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dalam iklim demokratis. Fungsi stabilisasi politik yang dilakukan negara dengan dukungan rakyat secara partisipatif, perlu mempertimbangkan unsur inisiatif lokal dalam mengatasi berbagai persoalannya sebagaimana diagendakan dalam era otonomi

daerah saat ini. Hal ini tetap menjadi catatan penting, meskipun Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan persoalan pertahanan keamanan dikecualikan dari kewenangan daerah, di samping bidang politik luar negeri, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.<sup>24</sup>

### Penutup

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antar berbagai faktor yang menjadi akar masalah penyebab terjadinya konflik etnis di Kalbar dan Kalteng, baik menyangkut kontradiksi budaya, kekerasan struktural, dan peranan managerial domain publik dari negara. Menyadari adanya pengaruh faktor satu sama lain yang erat dan tidak terpisahkan, maka diperlukan sebuah upaya pendekatan bersifat menyeluruh dan dilakukan secara total meliputi bidang sosial politik, ekonomi, kebudayaan, dan keamanan. Diharapkan dengan adanya pendekatan semacam itu akan mengembalikan mengerasnya loyalitas sempit etnis yang mengarah pada pola konfrontatif men-

<sup>24</sup> Pada ayat (2) UU tersebut menyatakan: "Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

jadi sebuah keseimbangan dalam mengembangkan sebuah perspektif nasionalisme secara demokratis.

Pada tataran sosial politik dan sekaligus kebudayaan, dilakukan pengembangan kondisi yang kondusif bagi budaya lokal keanekaragaman dengan memberdayakan kembali lembaga-lembaga adat lokal. Hal ini didukung dengan memulihkan peranan politik pemerintah daerah yang secara profesional semakin mampu menangkap aspirasi rakyat setempat melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Untuk itu perlu dipikirkan sebuah kerangka otonomi yang benar-benar bertumpu pada realitas tuntutan atau aspirasi masyarakat setempat, tanpa harus terjebak pada benturan efektifitas fungsi pelayanan publik birokrasi dengan prakarsa lembaga-lembaga adat masyarakat setempat.

Pada tataran ekonomi, sentra-sentra bisnis yang menjadi salah satu pemicu kecemburuan penduduk asli Dayak terhadap suku pendatang Madura sejauh mungkin didefinisi dalam kerangka tetap terjaganya perkembangan wilayah sekitar. Hal ini dilakukan, tanpa harus mengorbankan akses di tingkat bawah yang justru memperparah jurang kesenjangan. Untuk itu, agenda peningkatan kapasitas ekonomi

penduduk asli dilakukan secara bertahap seiring dengan pematangan kondisi kondusif bagi kedatangan kembali para pengungsi yang berasal dari pendatang Madura ke Kalbar dan Kalteng. Pemulangan kembali para pengungsi suatu keharusan, mengingat mereka adalah bangsa Indonesia yang berhak suatu saat untuk menempati kembali hak-hak hidupnya di tempat pengembaraan. Kalaupun pada saat sekarang dirinya tidak mungkin kembali ke Kalimantan, maka hal itu harus dipandang sebagai keadaan terpaksa yang menjadi tugas pemerintah daerah setempat untuk memulihkan rasa aman di tengah lingkungannya.

Akhirnya pada tataran keamanan, dengan pemisahan Polri dari TNI, maka aparat kepolisian harus mampu menjadi ujung tombak dalam menjaga tertib sipil di wilayah tersebut. Pada konteks ini, keberadaan aparat TNI untuk membantu tugas kepolisian hanya bersifat sementara, yang pada suatu saat akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mengatasinya. Hal ini tentu tetap didasarkan atas kesadaran mengenai keterkaitan yang erat antara soal-soal pertahanan di satu sisi dengan masalah keamanan di sisi lain. Tanpa upaya mengatasi ruang abu-abu (*grey area*) yang dihada-

pi dalam penanggulangan persoalan keamanan di tingkat lapangan pasca pemisahan TNI dan Polri, dipastikan akan terjadi salah paham yang mudah menimbulkan bentrok di antara sesama aparat itu sendiri atau bahkan antara aparat dengan kalangan masyarakat.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Diamond, Larry dan Palttner, F, Marc (Ed.), *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*, Penerbit ITB Bandung, 1994.

Emerson, K, Donald (Ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2001.

Kohn, Hans, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahanya*, Pustaka Sardjana PT Pembangunan, Jakarta, 1958.

Miall, Hugh, Rombutsham, Oliver, dan Woodhouse, Tom, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.

Sударsono, Juwono (Ed.), *Pembangunan Politik Dan Pe-*

*rubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1982.

#### Jurnal

Eep Saefullah Fattah, "Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi: Sebuah Penajagan Teoritis", *Prisma* 18 Agustus 1994

#### Makalah

Yudi Latif, "Dari Wacana Kebangsaan Menuju Wacana Kenegaraan: Menganyam Bangunan Retak Kebangsaan Melalui Reformasi Pengelolaan Negara", Pidato Politik dalam rangka Peluncuran CPPS Paramadina, Jakarta, 14-3-2001.

#### Koran

Sumardjan, Selo, "Konflik Antar Suku di Indonesia", *Kompas*, 22-3-2001

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, "Mencegah Konflik Kekerasan Antar Etnis", *Kompas* 3-4-2001

Ahmad Fathoni Rodli, "Menelusuri Resolusi Konflik Etnis di Kalimantan", *Suara Pembaruan*, 3-2-2001.

Menguak Konflik Antar Etnis di Tanah Dayak: Adakah Pertikaian Itu Karena Masalah Martabat? (Bagian II)", *Media Indonesia*, 8-

3-2001.

Yonky Karman, "Kerusuhan di Kalimantan Barat: Potret Rekonsiliasi Setengah Hati", *Kompas* 20-11-2001.

Anhar Gonggong, "Ketika Orang-orang Kalah yang Se-

bangsa itu Saling Benci", *Suara Pembaruan* 3-3-2001.

Kusnaedi, "Negara, Kelompok Etnik, dan Konflik Sosial", *Kompas* 4-3-2001.

Ben Mboi, "Otonomi Daerah Terlalu Cepat?", *Kompas* 4-4-2001.